

**PELAKSANAAN SISTEM TANAM PAKSA DI
KERESIDENAN PALEMBANG 1830--1870 (SUATU
KAJIAN HISTORIS)**

SKRIPSI

Oleh:

RESTI JUWITA MAHARANI

NIM 352022006



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
TAHUN 2026**

**PELAKSANAAN SISTEM TANAM PAKSA DI
KERESIDENAN PALEMBANG 1830--1870 (SUATU
KAJIAN HISTORIS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Muhammadiyah Palembang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Sarjana Pendidikan

Oleh:

RESTI JUWITA MAHARANI

NIM 352022006

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
TAHUN 2026**

Skripsi oleh Resti Juwita Maharani diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, Juni 2026

Pembimbing I



Dra. Nurhayati, M.Pd.

Palembang, Juni 2026

Pembimbing II



Dewi Setyawati, M.Pd.

**Skripsi oleh Resti Juwita Maharani telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 30 Juni 2026**

Dewan Penguji



Dra. Nurhayati, M.Pd., Ketua



Dewi Setyawati, M.Pd., Anggota



Dra. Fatmah, M.Hum., Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi

Pendidikan Sejarah



Dr. Apriana, M. Hum

NIDN. 02040460006

Mengesahkan

Dekan



Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

NIDN. 0023036701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Juwita Maharani

Nim : 352022006

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Telp/HP : 082298484278

Menyatakan bahwa skripsi berjudul

**"Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Keresidenan Palembang 1830-1870
(Suatu Kajian Historis)"**

Berserta seluruh isinya adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan -aturan etika keilmuan dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menerima segala sanksi yang berlaku atau yang ditetapkan untuk itu, apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya.

Palembang Juni 2026

Yang bersangkutan



**Resti Juwita Maharani
NIM. 352022006**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyirah Ayat 6-8).*
- *Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga (HR. Shahih Muslim). Ilmu bukan tentang gelar, tetapi tentang perjuangan, kesabaran dan keberkahan hidup di masa depan.*

Persembahan:

Dengan penuh rasa Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Suryono dan Ibunda Kurniawati, yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a dalam setiap Langkah penulis.*
- ❖ *Kedua saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat*
- ❖ *Ibunda Dra. Nurhayati, M.Pd dan ibunda Dewi Setyawati, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan berharga hingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- ❖ *Untuk seseorang yang selalu ada disaat suka maupun duka, serta memberikan semangat dan doa, Brata Shika Praja Pratama.*
- ❖ *Untuk teman seperjuanganku yang telah memberikan bantuan serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini : A6 (Yoga, Elfin, Rey).*
- ❖ *Teman-teman Angkatan 2022 Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, berbagi ilmu, pengalaman serta kebersamaan yang penuh makna.*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

Maharani, Resti Juwita. 2026. *Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Keresidenan Palembang 1830 - 1870 (Suatu Kajian Historis)*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah. Progam Sarjana (S1), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (1) Dra. Nurhayati, M.Pd. (2) Dewi Setyawati, M.Pd.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui tentang pelaksanaan sistem tanam paksa di Keresidenan Palembang 1830-1870. **Rumusan Masalah** (1) Apa yang melatarbelakangi diterapkannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda di Keresidenan Palembang tahun 1830-1870? (2) Bagaimana mekanisme dan aturan pokok sistem tanam paksa di Keresidenan Palembang? (3) Bagaimana dampak ekonomi, sosial dan kultural dari pelaksanaan tanam paksa bagi kehidupan masyarakat Keresidenan Palembang pada masa itu? (4) Mengapa sistem tanam paksa akhirnya mendapat kritik dan mulai dihapuskan di Keresidenan Palembang? **Jenis Penelitian** Kajian Pustaka. **Metode** yang penulis gunakan adalah **metode historis** dengan cara mengumpulkan data (heuristik), penafsiran (interpretasi), sehingga menghasilkan penulisan Sejarah (historiografi). Penulis juga menggunakan **pendekatan** historis, pendekatan politik, pendekatan sosial, pendekatan ekonomi, pendekatan geografi dan pendekatan militer. **Kesimpulan** dari penelitian ini adalah (1) Latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa di Keresidenan Palembang berkaitan dengan krisis keuangan pemerintah kolonial Belanda setelah Perang Diponegoro dan konflik di Eropa. Untuk menutupi defisit negara, Belanda menjadikan wilayah jajahan sebagai sumber pemasukan melalui eksploitasi ekonomi. Penerapan sistem ini juga dipengaruhi oleh kegagalan sistem pajak tanah (*landrente*) serta upaya menghidupkan kembali monopoli ekonomi seperti VOC dalam bentuk baru. Tanam paksa di Palembang juga didukung oleh letak geografis yang strategis, tanah yang subur, kekayaan sumber daya alam dan jalur perdagangan Sungai Musi yang memudahkan distribusi hasil perkebunan ke pasar internasional. (2) Mekanisme pelaksanaan sistem tanam paksa di Keresidenan Palembang dilakukan melalui kerja sama pemerintah kolonial dengan elite lokal seperti pasirah, depati, dan kepala marga untuk mengawasi penanaman tanaman ekspor, terutama kopi dan lada. Meskipun secara resmi rakyat hanya diwajibkan menyediakan seperlima tanah dan mendapat perlindungan tertentu, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan berupa perluasan lahan wajib tanam, kerja berlebih dan pembayaran hasil panen yang rendah. Akibatnya, sistem ini lebih menguntungkan pemerintah kolonial Belanda dibandingkan masyarakat pribumi. (3) Sistem tanam paksa memberikan dampak besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat Palembang. Dalam *bidang ekonomi*, rakyat kehilangan kebebasan mengelola lahan sehingga produksi pangan menurun dan kemiskinan meningkat. Dalam *bidang sosial*, kesenjangan antara elite lokal dan rakyat semakin besar serta menimbulkan penderitaan akibat beban kerja berat. Dari *sisi kultural*, masyarakat berubah dari pola agraris tradisional menuju ekonomi kolonial yang berorientasi pasar internasional. (4) Sistem tanam paksa akhirnya mendapat banyak kritik dari masyarakat pribumi dan kaum liberal di Belanda karena dianggap menimbulkan penderitaan rakyat, penyalahgunaan kekuasaan serta bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan ekonomi liberal. Melalui hasil karya Max Havelaar termasuk kritik tersebut juga mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan kolonial. Sejak tahun 1870, sistem tanam paksa mulai dihapus secara bertahap dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal yang memberi peluang bagi perusahaan swasta asing. Namun, perubahan ini tidak mengakhiri eksploitasi kolonial di Keresidenan Palembang, melainkan hanya mengubah bentuk penguasaan ekonomi dari sistem negara menjadi kapitalisme swasta. **Saran** (1) Bagi pembaca dengan membaca keseluruhan tulisan ini diharapkan mampu mengetahui pelaksanaan sistem tanam paksa di Palembang 1830-1870. (2) Bagi mahasiswa Pendidikan sejarah semoga penulisan ini dapat menginspirasi untuk penelitian selanjutnya. (3) Bagi perpustakaan universitas muhammadiyah Palembang khususnya perpustakaan FKIP diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah tentang sejarah kolonial dan sejarah lokal Sumatera Selatan dan dapat meningkatkan akses terhadap sumber digital, sehingga kegiatan penelitian sejarah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih mendalam.

Kata Kunci: Tanam Paksa, Cultuurstelsel, Palembang

ABSTRACT

Maharani, Resti Juwita. 2026. *The Implementation of the Forced Planting System in Palembang 1830 – 1870 (A Historical Study)*. Thesis, History Education Study Program. Undergraduate Program (S1), Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Palembang. Supervisors: (1) Dra. Nurhayati, M.Pd. (2) Dewi Setyawati, M.Pd.

This research is motivated by the author's desire to know about the implementation of the forced planting system in Palembang 1830-1870. **Problem Formulation** (1) What was the background for the implementation of the forced planting system by the Dutch colonial government in Palembang in 1830-1870? (2) What are the mechanisms and main rules of the forced planting system in Palembang? (3) What was the economic, social and cultural impact of the implementation of forced planting on the lives of the people of Palembang at that time? (4) Why did the forced planting system finally receive criticism and begin to be abolished in Palembang? **Types of Literature Review Research.** The method used by the author is **the historical method** by collecting data (heuristic), interpretation (interpretation), so as to produce historical writing (historiography). The author also uses **historical approaches, political approaches, social approaches, economic approaches, geographical approaches and military approaches.** The conclusions of this study are (1) The background of the implementation of the forced planting system in Palembang is related to the financial crisis of the Dutch colonial government after the Diponegoro War and conflicts in Europe. To cover the state deficit, the Dutch made the colonies a source of income through economic exploitation. The implementation of this system was also influenced by the failure of the land tax system (landrente) and efforts to revive economic monopolies such as the VOC in a new form. Forced planting in Palembang is also supported by its strategic geographical location, fertile soil, rich natural resources and trade routes of the Musi River that facilitate the distribution of plantation products to the international market. (2) The mechanism for implementing the forced planting system in Palembang was carried out through the cooperation of the colonial government with local elites such as pasirah, depati, and clan heads to supervise the cultivation of export crops, especially coffee and pepper. Although officially the people are only required to provide one-fifth of the land and receive certain protections, in practice there are often irregularities in the form of expansion of compulsory cultivated land, overwork and low crop payments. As a result, this system was more favorable to the Dutch colonial government than to the indigenous people. (3) The forced planting system has a great impact on the economic, social and cultural life of the people of Palembang. In the economic field, people lose the freedom to manage land so that food production decreases and poverty increases. In the social sphere, the gap between the local elite and the people is getting bigger and causing suffering due to heavy workload. From a cultural perspective, society changed from a traditional agrarian pattern to an international market-oriented colonial economy. (4) The forced planting system eventually received a lot of criticism from indigenous communities and liberals in the Netherlands because it was considered to cause suffering to the people, abuse of power and was contrary to humanitarian and liberal economic principles. Through the work of Max Havelaar, including this criticism, it also encouraged the Dutch government to change colonial policies. From 1870 onwards, the forced farming system began to be phased out and replaced by a liberal economic system that provided opportunities for foreign private enterprises. However, this change did not end colonial exploitation in Palembang, but only changed the form of economic control from the state system to private capitalism. **Suggestion** (1) For the reader by reading the entire article, it is hoped that he will be able to know the implementation of the forced plantation system in Palembang 1830-1870. (2) For history education students, hopefully this writing can inspire for future research. (3) For the library of the University of Muhammadiyah Palembang, especially the FKIP library, it is hoped that it can add to the collection of scientific works on colonial history and local history of South Sumatra and can increase access to digital sources, so that historical research activities can be carried out more easily and more in-depth.

Keywords: Forced Planting, Cultuurstelsel, Palembang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehairat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Keresidenan Palembang 1830-1870 (Suatu Kajian Historis)*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat mengatasinya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Indawan Syahri M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Dr. Apriana M.Hum., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Dra. Nurhayati M.Pd., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Dewi Setyawati M.Pd., Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kedua orang tua tercinta Ibunda Kurniawati dan Ayahanda Suryono serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan, seperti pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, demikian juga penulis tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, dengan ketulusan hati penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengajaran bidang studi pendidikan sejarah dan masyarakat pada umumnya.

Palembang, Juni 2026

Resti Juwita Maharani
NIM.352022006

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	14
C. Perumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Definisi Istilah	17
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA	22
A. Kajian Teori.....	22
1. Teori Kolonialisme.....	22
2. Pengertian Tanam Paksa	27
3. Pelaksanaan Tanam Paksa.....	28
4. Tanaman Yang Dihasilkan Pada Masa Tanam Paksa.....	29
5. Keresidenan Palembang	34
6. Peranan Elit Lokal Pada Masa Tanam Paksa	46
7. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Palembang Sebelum di Berlakukannya Sistem Tanam Paksa.....	48
B. Kajian Relevan.....	50
BAB III	56
METODE PENELITIAN	56
A. Metode Penelitian.....	56
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58

1. Pendekatan Penelitian.....	58
2. Jenis Penelitian.....	65
C. Lokasi Penelitian	65
D. Kehadiran Penelitian	66
E. Sumber Data	66
F. Prosedur Pengumpulan Data	68
1. Studi Kepustakaan	69
2. Dokumentasi	69
G. Teknik Analisa Data	70
1. Kritik Sumber (verifikasi)	71
2. Interpretasi.....	73
3. Historiografi	73
H. Tahap-tahap Penelitian	75
BAB IV.....	77
PEMBAHASAN	77
1. Latar Belakang Diterapkannya Sistem Tanam Paksa Oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Kresidenan Palembang Tahun 1830-1870	77
2. Mekanisme dan Aturan Pokok Sistem Tanam Paksa di Kresidenan Palembang.....	89
3. Dampak Ekonomi, Sosial dan Kultural Dari Pelaksanaan Tanam Paksa Bagi Kehidupan Masyarakat Kresidenan Palembang Pada Masa Itu	96
4. Sistem Tanam Paksa Akhirnya Mendapat Kritik dan Mulai Dihapuskan di Kresidenan Palembang	100
BAB V	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR RUJUKAN	108
RIWAYAT HIDUP	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Johannes Van den Bosch, pencetus Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), 1830	115
Gambar 2. Eduard Douwes Dekker (Multatuli), pengkritik Sistem Tanam Paksa melalui novel <i>Max Havelaar</i>	115
Gambar 3. Budidaya Kopi Pasemah	116
Gambar 4. Aliran Sungai Ogan di Uluhan Palembang.....	116
Gambar 5. Bagian Ulu Sungai Musi	117
Gambar 6. Perkebunan Teh Dempo Pagar Alam	117
Gambar 7. Pabrik Pengolahan Teh Gunung Dempo	118
Gambar 8. Mesin Peninggalan Belanda	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti.....	54
Tabel 3.1 Tahap-Tahap Penelitian	64

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Surat Usulan Judul Skripsi	119
Lampiran 2. Surat Tugas Pembimbing Proposal	120
Lampiran 4. Surat Tugas Ujian Proposal.....	121
Lampiran 5. Daftar Hadir Seminar Proposal.....	122
Lampiran 6. SK Pembimbing Skripsi.....	123
Lampiran 7. Lembar Bimbingan	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) yang diperkenalkan oleh Van den Bosch pada tahun 1830 muncul sebagai respons atas krisis keuangan yang dialami Kerajaan Belanda setelah Perang Jawa (1825–1830) dan konflik Belanda–Belgia (1830–1831). Selama pelaksanaannya pada rentang 1830–1870, kebijakan ini menjadi beban berat bagi rakyat Indonesia karena rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor dan menyerahkan sebagian besar hasilnya sebagai bentuk pajak. Menurut Susilo & Sarkowi bahwa: “jauh sebelum kedatangan Belanda dan penerapan *Cultuurstelsel*, sudah terjadi sebuah peristiwa besar yang mengubah arah perdagangan global dan mendorong bangsa-bangsa Eropa, termasuk Belanda mencari rute baru menuju pusat rempah-rempah di Asia. Peristiwa tersebut adalah jatuhnya Konstantinopel, yang menjadi titik penting dalam perubahan jalur perdagangan dunia” (Susilo & Sarkowi, 2020: 14).

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di kepulauan Nusantara pada awalnya merupakan bagian dari kegiatan perdagangan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan setara, antara pedagang dan pembeli. “Namun, keadaan itu perlahan-lahan mulai berubah, karena tingginya persaingan perdagangan antar negara menyebabkan bangsa-bangsa Eropa untuk berusaha menguasai sumber-sumber rempah-rempah” (Absiroh dkk, 2017: 5).

Di Palembang, kedatangan Belanda pertama kali terjadi pada tahun 1617, pada masa wilayah tersebut masih berada di bawah kekuasaan penguasa lokal, yaitu Kesultanan Palembang, ketika Belanda datang dalam bentuk perserikatan dagang melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*. Gubernur Jenderal Jan Piter Zoon Coen mengirimkan utusan ke Palembang yaitu Cryn van Raemburch, dengan maksud untuk mengadakan hubungan dagang dengan Palembang. Penguasa di daerah ini menerima dengan baik kedatangan bangsa itu, karena hal itu akan menambah ramainya

perdagangan di Palembang yang berarti akan menambah keuntungan juga (Abdullah dkk, 1991: 72).

Pada pertengahan abad ke-17, VOC mulai memperkuat pengaruhnya di Palembang karena kepentingan terhadap perdagangan timah Bangka yang bernilai strategis bagi industri militer dan perdagangan. Upaya VOC untuk memonopoli perdagangan timah menimbulkan ketegangan dengan Kesultanan Palembang, terlebih dengan adanya persaingan dari Inggris yang juga ingin memperluas pengaruh di wilayah tersebut. “Dalam situasi tekanan dari kekuatan Eropa, penguasa Palembang, Pangeran Seda Ing Pasarean, mencoba meminta dukungan kepada Kesultanan Mataram dengan mengirim utusan kepada Sultan Agung pada tahun 1642” (Ricklefs, 2008: 120), namun bantuan tersebut gagal sampai karena dihalangi oleh Belanda, sebagaimana di jelaskan oleh Abdullah bahwa: “Ketegangan ini kemudian memicu konflik bersenjata antara Palembang dan VOC pada tahun 1643 yang ditandai dengan serangan terhadap fasilitas Belanda di Batu Ampar Ilir yaitu suatu kawasan di bagian hilir wilayah Palembang yang berada di sekitar aliran Sungai Musi dan pada masa itu menjadi lokasi aktivitas perdagangan VOC” (Abdullah dkk., 1991: 74).

Berdasarkan uraian di atas peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-17 Palembang telah menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kekuatan kolonial karena kekayaan sumber daya alamnya. Konflik antara penguasa lokal dan VOC menjadi awal semakin kuatnya campur tangan Belanda di bidang politik dan ekonomi. Setelah kekuasaan Kesultanan Palembang dilemahkan dan akhirnya dihapuskan pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda lebih mudah mengendalikan wilayah ini dan kemudian menerapkan berbagai kebijakan ekonomi kolonial, termasuk sistem tanam paksa, *Cultuurstelsel*.

Setelah gagal meminta bantuan ke Mataram dan mengakibatkan VOC mengalami kerugian Pangeran Mangkuran, seorang bangsawan dan pejabat penting dalam pemerintahan Palembang terpaksa menandatangani kontrak penjualan lada dengan Belanda di bawah pimpinan Jeremias Van Bliet melalui kontrak tersebut, VOC memonopoli perdagangan lada dari daerah pedalaman

Palembang seperti Ogan, Komering dan Musi serta mengontrol ketat pelayaran perdagangan Palembang melalui Sungai Musi. Tindakan VOC itu mendatangkan ketidakpuasan sultan, sebab tidak semua pelayaran Palembang mengangkut lada. Palembang berusaha menurunkan ekspor ladanya ke Batavia dengan menjalin hubungan dagang dengan Inggris di Malaka. VOC mengancam akan menyerang Palembang yang dianggap melanggar kontrak awal dengan kongsi dagang itu, “akan tetapi, Palembang tidak gentar sehingga VOC benar-benar menyerang Palembang pada 1659 yang menyebabkan Palembang luluh lantak dan keraton Kuto Gawang dibakar” (Kielstra 1892: 76–94).

Lebih lanjut Nurhayati dalam bukunya *Sejarah Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang Darussalam* menjelaskan bahwa:

Pada tahun 1659 Kuto Gawang dibakar Belanda dalam perang Palembang melawan VOC. Hancurnya Kuto Gawang sebagai pertanda berakhirnya eksistensi Kerajaan Palembang dan berpengaruh terhadap pemindahan pusat pemerintahan dan pemukiman masyarakat ke arah yang semakin ke hulu, yang terletak antara Sungai Rendang dan Sungai Tengkuruk. Kawasan ini kemudian dikenal dengan nama Beringin Janggut. Setelah kehancuran Kuto Gawang sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Palembang, dan kekecewaan dari Kemas Hindi terhadap Mataram, maka lahirlah Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1662 (Nurhayati, 2025: 125).

Berkat jasa-jasa baik raja Jambi yang pada waktu itu bertindak sebagai orang ketiga, maka antara Palembang dan Belanda diadakan beberapa perundingan. Belanda berhasil mendapat izin dari Pangeran Ratu Ki Mas Hindi untuk mendirikan sebuah kantor dagang yang letaknya di seberang istana Sultan (di sungai Aur). Pada tahun 1706, Sultan Abdurrahmaan Wafat dan mengantarkan putranya, Raden Aria naik takhta dengan gelar Sultan Ratu Muhammad Mansur. Masa pemerintahannya diwarnai oleh konflik internal keluarga kerajaan, terutama persaingan antar putra-putranya untuk memperebutkan kekuasaan. Berdasarkan pertimbangan keluarga kerajaan dan keputusan Sultan Muhammad Mansur sendiri, takhta tidak diwariskan kepada putranya yaitu Pangeran Dipati dan Pangeran Jaya Wikrama (Raden Lembu) yang merupakan putra-putra Sultan Muhammad Mansur melainkan

diserahkan kepada saudaranya, yaitu Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno, yang berkuasa antara tahun 1718–1727. Pangeran Dipati dan Pangeran Jaya Wikrama (Raden Lembu) terlibat dalam persaingan untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh dalam Kesultanan Palembang. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Komaruddin, pertikaian antara Pangeran Dipati dan Pangeran Jaya Wikrama (Raden Lembu) semakin memanas dalam memperebutkan kekuasaan di lingkungan istana. Dalam situasi tersebut, VOC memanfaatkan konflik internal kerajaan dan ikut campur dengan dalih menjaga keamanan. Abubakar menjelaskan bahwa: “atas permintaan Sultan Komaruddin, Belanda mengirimkan ekspedisi militer di bawah pimpinan Willem Daams. Akibatnya, Pangeran Dipati terpaksa melarikan diri, sementara kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan Pangeran Jaya Wikrama yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Mahmud Badaruddin I” (Abubakar dkk, 2020: 39). Lebih lanjut Abdullah dkk menjelaskan bahwa:

Sebagai imbalan atas pengangkatan Jaya Wikrama Sebagai Sultan Palembang, VOC memberlakukan kontrak baru yang semakin memperkuat pengaruh Belanda di Palembang. Melalui perjanjian tersebut, Belanda berhasil menguasai perdagangan utama, khususnya lada dan timah Bangka, selama hampir satu abad Belanda menguasainya tanpa perlawanan berarti. Aktivitas dagang VOC di wilayah ini dikendalikan dari loji Belanda di tepi Sungai Musi yang berada di bawah administrasi Batavia (Abdullah dkk, 1991: 79).

Menjelang akhir abad XVIII, VOC mengalami kemunduran. Moralitas pegawai-pegawai VOC mulai menurun karena rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Praktik-praktik korupsi mulai marak dan menggerogoti pondasi kongsi dagang Hindia Belanda. Ketika VOC dibubarkan tahun 1799, terjadi dua perubahan penting di Palembang sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar bahwa:

Pertama, pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) pada 1803. Perubahan *ke-dua* ialah Indonesia (*Ooetkintische-Bezittingen*) diserahkan kepada Republik Bataaf, dan setelah negeri Belanda jatuh ke tangan Prancis, maka pulau Jawa di bawah pengaruh Prancis sampai tahun 1811 kemudian ditaklukan oleh Inggris pada tahun 1811, Penaklukan terhadap Perancis di Jawa yang dilakukan oleh Inggris membuat SMB II berkesempatan

melepaskan diri dari tekanan kolonialisme. SMB II memerintahkan pembumihangusan loji Sungai Aur milik Belanda di Palembang. Pada November 1811, Raffles mengirim tiga orang utusan ke Palembang untuk menemui SMB II. Namun, sikap SMB II tidak bersahabat dan menegaskan pengusiran Belanda dari Palembang tidak berarti harus menerima Inggris sebagai pewarisnya (Abubakar dkk, 2020: 50).

Tindakan Sultan yang menolak kehendak Raffles dan pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang dianggap tidak bermoral, merupakan alasan bagi Raffles untuk mengirim sebuah ekspedisi militer di bawah Mayor Jenderal Gillispie (20 Maret 1812) dari Batavia, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah dkk dalam bukunya *Sejarah daerah Sumatera Selatan* bahwa:

Sultan Badaruddin telah bersiap-siap menyambut kedatangan ekspedisi tersebut membuat benteng-benteng di tempat yang penting di sepanjang sungai Musi kubu-kubu meriam terapung perahu-perahu bersenjata dan rakit yang berisi bahan-bahan yang mudah terbakar, sedangkan pada kubu pertahanan yang sebenarnya di Palembang (dikeratonnya) terdapat 242 meriam yang siap menghadapi musuh, tetapi karena pengkhianatan adiknya sendiri (Pangeran Adipati Najamuddin II) dan lebih unggulnya persenjataan musuh, maka dalam waktu seminggu 24-4-1812 Palembang jatuh (Abdullah dkk, 1991: 79).

Setelah masuk Palembang, Inggris mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II (SAN II) sebagai Adipati, sehingga menciptakan sultan kembar di Palembang. Lebih lanjut Abubakar dalam bukunya *Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya* menjelaskan bahwa:

SMB II mengalah dan mundur ke uluan dengan mendirikan pemerintahan di pengasingan. Sejak itu pemerintahan di Kesultanan Palembang terbelah antara SAN II yang didukung oleh Inggris dan SMB II yang didukung oleh rakyat. Setelah pengangkatan SAN II harus menandatangani sebuah perjanjian yang ditetapkan 12 Mei 1812. Di situ ditegaskan bahwa Sultan Najamuddin II menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Inggris (Abubakar dkk, 2020: 52).

Penguasaan Inggris atas Hindia Belanda termasuk Palembang tidak berlangsung lama karena berdasarkan Persetujuan Landen tahun 1814, maka Palembang harus dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda yang baru dilaksanakan pada 29-6-1817, yang kemudian dipegang langsung oleh

Komisaris Belanda bernama Muntinghe, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah dkk bahwa:

Pada permulaan Juli 1818 Muntinghe menyeberang dari Bangka ke Palembang dengan tujuan yang sebenarnya perlahan-lahan melepaskan Palembang dari kekuasaan Sultan karena itu Muntinghe memaksa kedua Sultan itu menandatangani kontrak seperti tahun 1812 dengan Inggris, yang secara politis keduanya tidak berkuasa lagi (Abdullah dkk, 1991: 80).

Pada tahun 1818, Raffles kembali ke Bengkulu dan tetap berpegang pada ambisinya dengan mengklaim wilayah Palembang, Lampung, Minangkabau, hingga Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan klaim tersebut, Muntinghe mengirim dua ekspedisi berkekuatan sekitar 200–400 orang ke Palembang, yang memicu bentrokan antara Inggris dan Belanda di Muara Beliti sebelum akhirnya diselesaikan melalui perdamaian. Namun, dalam perjalanan kembali, Muntinghe diserang oleh pengikut Sultan Mahmud Badaruddin II, sehingga Muntinghe terpaksa mundur ke Palembang pada 7 Mei 1819. Muntinghe kemudian menuduh Sultan Badaruddin bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dengan menyerahkan putra sulungnya sebagai jaminan, yang justru menimbulkan kemarahan sultan. “Setelah Belanda menerima bala bantuan dari Batavia, pecalah Perang Palembang I pada 10 Juni 1819, yang berakhir dengan kekalahan pasukan Muntinghe” (Abubakar dkk, 2020: 56).

Setelah upaya sebelumnya gagal, Belanda kembali mengirim bala bantuan di bawah pimpinan Laksamana Wolterbeek dengan sekitar 2.000 marinir ke Palembang pada 22 Agustus 1819. Serangan ini memicu Perang Palembang II, namun pasukan Belanda berhasil dipukul mundur oleh Sultan Mahmud Badaruddin II di wilayah Pulau Kembara (Kemarau atau kemaro). Kemenangan tersebut menjadikan Kesultanan Palembang berada dalam kondisi merdeka sepenuhnya pada periode 1819–1821 dan mengalami kemajuan di berbagai bidang. Meski demikian, Belanda tidak menghentikan ambisinya. Abdullah menjelaskan bahwa: “Belanda kemudian menyusun rencana penyerangan lanjutan dengan memetakan kekuatan pertahanan

Sultan Badaruddin serta menerapkan strategi *divide et impera* dengan memanfaatkan kerabat dekat sultan sendiri” (Abdullah dkk, 1991: 82).

Setelah dilakukan persiapan yang matang serta didukung oleh bala bantuan, persenjataan dan armada perang yang didatangkan langsung dari Negeri Belanda, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Hindia Belanda, Jenderal Mayor Baron de Kock, melancarkan serangan besar terhadap Palembang. Kekuatan yang dikerahkan sangat besar, terdiri atas 47 kapal perang utama, 16 kapal pengangkut pasukan, ratusan meriam laut dan darat, serta ribuan marinir dan pasukan infanteri yang dilengkapi kapal-kapal perbekalan.

Pada tanggal 16 Juni 1821, Belanda memulai serangan pertama dengan menargetkan benteng-benteng pertahanan Sultan Mahmud Badaruddin. Serangan ini menandai pecahnya Perang Palembang III, namun upaya tersebut berhasil digagalkan dan pasukan Belanda dipukul mundur oleh pihak Palembang. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda kembali melancarkan serangan kedua yang lebih besar pada 24 Juni 1821 dengan mengkombinasikan serangan dari laut dan darat, sebagaimana dijelaskan oleh Abubakar dkk bahwa:

Dalam fase ini, terjadi pengkhianatan dari pihak internal keluarga kerajaan, yakni Pangeran Prabu Anom, putra Sultan Ahmad Najamuddin II, bersama ayahnya yang sebelumnya dibawa dari Batavia ke Palembang. Keduanya menunjukkan jalur belakang melalui Pulau Kembara yang kemudian dimanfaatkan Belanda untuk menembus pertahanan Palembang (Abubakar dkk, 2020: 57).

Serangan dari arah belakang tersebut menjadi titik balik yang melemahkan seluruh kekuatan pertahanan Palembang. Beberapa hari kemudian, benteng Sultan berhasil dikepung dari berbagai arah, sementara meriam kapal-kapal Belanda diarahkan langsung ke pintu keraton. “Dalam kondisi terjepit dan demi menghindari kehancuran keraton, Sultan Mahmud Badaruddin akhirnya menyerahkan diri” (Abdullah dkk, 1991: 82).

Pada 6-7-1821 Sultan Mahmud Badaruddin dibawa ke Batavia, dan kemudian dibuang ke Ternate. Sultan Mahmud Badaruddin wafat tanggal 26-

11-1852 15 sebagai seorang buangan yang dihormati oleh lawan dan kawan. Lebih lanjut Abubakar menjelaskan bahwa:

Setelah Sultan Mahmud Badaruddin II dibuang ke Ternate Pangeran Prabu Anom pada 16-7 -1821 dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Akhmad Najamuddin III, tetapi karena ia dianggap kurang cakap, maka kekuasaan seluruhnya diambil alih oleh Belanda, dan atas usul Komisaris Pemerintahan van Sevenhoven, maka pada 7-10-1823 seluruh daerah Palembang, Bangka dan Belitung resmi menjadi daerah kekuasaan Belanda langsung (Abubakar dkk, 2020: 59).

Setelah Belanda mengalahkan Kesultanan Palembang dan menguasai wilayah Palembang, maka Kesultanan Palembang dihapus dan dijadikan pemerintahan administratif kolonial, yakni Keresidenan Palembang. Rivai dalam bukunya *Sejarah Pendidikan di Kota Palembang* menjelaskan bahwa:

Pada 7 Oktober 1823, Belanda mengangkat J.L.van Sevenhoven sebagai Residen Pertama di Palembang, Luas Karesidenan Palembang kurang lebih 84.692 km². Keresidenan Palembang dibagi atas beberapa *Afdeeling* kecuali Ibukota Palembang. Masing-masing *Afdeeling* dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Tiap-tiap *Afdeeling* terdiri dari *Onder Afdeeling* yang dikepalai oleh seorang *Kontroler*. Tiap-tiap *Onder Afdeeling* terdapat marga-marga. Setiap marga dikepalai oleh seorang Kepala Marga (Pasirah) (Rivai, 2001: 13).

Sementara itu Ibukota Palembang dibagi atas dua distrik, yaitu Distrik Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu dipimpin oleh seorang Demang. Menurut Ari Panji dan Sri (2014:16) bahwa: Keresidenan Palembang dibagi menjadi sembilan *afdeeling*, yaitu sebagai berikut:

1. *Afdeeling* Ibukota Palembang.
2. *Afdeeling* Tebing Tinggi terbagi dalam beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu: Musi, Ulu, Kikim, Ampat Lawang, dan Rejang dan Lebong.
3. *Afdeeling* Lematang Ulu dan Ilir, terbagi dalam beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu: Lematang Ilir, dan Pasemah.
4. *Afdeeling* Komering Ulu, Ogan Ulu, dan Enim, terbagi dalam beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu: *onder Afdeeling* Ogan Ulu dan Enim dan *Onder Afdeeling* Mekakau dan Semendo.
5. *Afdeeling* Rawas.

6. *Afdeeling* Musi Ilir.
7. *Afdeeling* Ogan Ilir dan Blida.
8. *Afdeeling* Komering Ilir.
9. *Afdeeling* Banyuasin.

Johannes van den Bosch adalah seorang pejabat kolonial Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada awal abad ke-19 dan dikenal sebagai pencetus sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) Pada tahun 1829 Van den Bosch membuat sebuah peraturan yang mewujudkan kepada rakyat untuk menyerahkan *landrento* (pajak tanah) bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk tenaga kerja tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Susilo & Sarkowi dalam bukunya *Pengaruh Politik Dan Cultuurstelsel Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia Tahun 1830-1870*, bahwa:

Van den Bosch membuat peraturan bagi rakyat untuk menyerahkan pajak tanah (*Landrento*) untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang laku di Eropa. Selain itu, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah Kolonial (Susilo & Sarkowi, 2020: 15).

Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa, selain di Jawa *Cultuurstelsel* juga dijalankan di Palembang. Menurut Hafiz menjelaskan bahwa: "tanam paksa yang dilakukan di Palembang terjadi pada perkebunan kopi, terdapat di wilayah Muara Enim, Lahat dan Pagar Alam" (Hafiz, 2020: 9). Lebih lanjut Safitri juga menjelaskan bahwa:

Dataran tinggi atau tanah-tanah pegunungan ditanami kopi. Jon Cornelis Reijnt (Residen di Palembang), menemukan kebun kopi kecil di Hulu Musi dan di Lembah Empat Lawang. Kopi maupun kapas bukanlah produk baru. Sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam, kopi telah ditanam, terutama di daerah Hulu Musi dan Empat Lawang di daerah Lematang Hulu Lahat dan daerah Pagar Alam (Safitri. 2017: 87).

Pada awalnya, produksi kopi belum mencapai setengah ton per tahun. Hal ini terjadi karena pada abad ke-19 belum ada dorongan untuk meningkatkan produksi di luar daerah tersebut. Selain itu, tidak tersedia jalan sebagai sarana transportasi yang baik untuk mengangkut kopi dari Bukit Barisan ke dataran rendah Palembang. Menurut Djajadiningrat bahwa: “distribusi yang buruk membuat kopi menjadi komoditas yang tertinggal. Setelah pendudukan militer di wilayah pegunungan berakhir pada tahun 1866, mulai ada usaha untuk membuka jalur darat antara Palembang dan Bengkulu dengan cara memperbaiki jalan yang melewati Bukit Barisan” (Djajadiningrat, 1983: 188).

Mekanisme sistem tanam paksa di Palembang dilakukan dengan mewajibkan penduduk menyerahkan sebagian tanah mereka biasanya sekitar seperlima dari lahan Garapan untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, lada atau nila. Pemerintah kolonial menunjuk pejabat lokal dan kepala marga sebagai perantara untuk mengatur tenaga kerja, mengumpulkan hasil panen serta membagikan bibit dan peralatan. Menurut Sawirman dalam bukunya menjelaskan bahwa: “secara aturan resmi dalam *Staatblad*, lahan yang digunakan untuk tanam paksa tidak dikenai pajak dan waktu kerja rakyat tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Namun kenyataannya, aturan tersebut sering dilanggar sehingga rakyat semakin terbebani dan hasil pertanian lokal menurun” (Sawirman, 2010: 112). Lebih lanjut Darmawan juga menjelaskan bahwa: “Para pemimpin lokal yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial ikut menekan rakyat untuk menyerahkan lebih banyak hasil panen, sehingga pelaksanaan *cultuurstelsel* menjadi sangat menindas dan menyebabkan ketimpangan sosial serta ekonomi” (Darmawan, 2015: 57).

Pada saat sistem tanam paksa mulai diterapkan di Palembang pada tahun 1830, Kesultanan Palembang sudah tidak berkuasa lagi karena Belanda membubarkannya pada 1823. Karena itu, sultan tidak memiliki wewenang dalam pemerintahan maupun pengelolaan tanah. Sultan juga tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan *cultuurstelsel*, semua urusan seperti pengaturan lahan, pengumpulan hasil, dan pengawasan kerja rakyat ditangani oleh pejabat kolonial dan kepala marga yang ditunjuk. Sejarawan daerah mencatat

bahwa: “setelah kesultanan dihapus, sultan tidak lagi memiliki peran dalam kebijakan ekonomi kolonial, termasuk tanam paksa” (Darmawan, 2015: 42). Struktur politik tradisional Palembang tidak dilibatkan lagi karena Belanda membangun birokrasi baru yang sepenuhnya dikuasai kolonial, sehingga “peran sultan tinggal sebatas simbol dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Cultuurstelsel*” (Santoso, 2010: 87).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: setelah Belanda membubarkan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1823, sultan tidak lagi memiliki kekuasaan. Saat sistem tanam paksa mulai diterapkan pada tahun 1830, sultan hanya menjadi simbol tanpa peran nyata. Semua urusan pemerintahan dan pelaksanaan tanam paksa seperti pengaturan tanah, pengawasan kerja, dan pengumpulan hasil sepenuhnya dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda dan aparat yang mereka tunjuk. Akibatnya, sistem kekuasaan tradisional Palembang tidak lagi berfungsi dan digantikan oleh sistem birokrasi kolonial.

Dalam penerapan tanam paksa di Palembang membawa dampak besar pada perekonomian karena banyak tenaga kerja dan lahan warga dipaksa dialihkan untuk menanam tanaman ekspor. “Akibatnya, produksi pangan menurun dan pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan kerja yang mereka berikan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa: hasil tanaman wajib tidak dinikmati rakyat, sementara beban kerja justru makin berat” (Herlina, 2008: 54). Suharto dalam bukunya *Struktur Sosial dan Perubahan Masyarakat Sumatera Selatan* Dalam bidang sosial, menjelaskan bahwa: “hubungan antara rakyat dan pejabat pribumi berubah karena banyak kepala marga menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Hal ini menimbulkan jarak sosial dan berbagai bentuk pemaksaan yang membuat rakyat resah” (Suharto, 2011:102). Lebih lanjut Mahyuddin juga menjelaskan bahwa:

Dari sisi budaya, pola hidup agraris masyarakat Palembang yang sebelumnya berpusat pada kebutuhan komunitas berubah menjadi pola tanam yang dikendalikan pemerintah kolonial. Nilai-nilai seperti gotong royong, pola musim tanam dan pengelolaan lahan adat ikut bergeser, campur tangan kolonial dalam pola tanam mengurangi peran adat dan mengubah cara masyarakat memandang tanah serta waktu kerja (Mahyuddin, 2013: 76).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: penerapan tanam paksa di Palembang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. *Dari segi ekonomi*, rakyat dirugikan karena tenaga dan lahan mereka dipaksa untuk tanaman ekspor; sehingga hasilnya tidak mereka nikmati dan kebutuhan pangan justru menurun. *Dari segi sosial*, hubungan antara rakyat dan pemimpin lokal berubah. Kepala marga yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial, sehingga menimbulkan tekanan dan keresahan di masyarakat. Sementara itu, *dari segi budaya*, cara hidup masyarakat juga berubah. Pola pertanian yang sebelumnya mengikuti adat dan kebutuhan bersama menjadi dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Akibatnya, nilai-nilai seperti gotong royong dan aturan adat mulai melemah.

Menurut Margano (2012: 45) bahwa: “keputusan pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Palembang diputuskan karena daerah ini memiliki tanah endapan sungai yang sangat subur serta didukung jaringan sungai yang memudahkan pengangkutan hasil panen ke pelabuhan, sehingga dianggap mampu menghasilkan komoditas ekspor penting seperti kopi, tebu, dan lada”. Wahyono dalam bukunya juga menjelaskan bahwa: “setelah Kesultanan Palembang dibubarkan pada 1823, pemerintah kolonial Belanda juga memperoleh kendali penuh atas pemerintahan lokal, yang membuat mobilisasi tenaga kerja dan pengaturan produksi tanaman ekspor semakin mudah dilakukan” (Wahyono, 2018: 73). Lebih lanjut Alfian juga menjelaskan bahwa: “kegagalan sistem sewa tanah yang tidak memberikan pemasukan berarti turut mendorong Belanda memilih tanam paksa sebagai cara menutup defisit anggaran pasca Perang Diponegoro. Palembang dipandang cocok karena memiliki komoditas unggulan yang sejak lama dikenal dalam perdagangan internasional yaitu tanaman lada” (Alfian, 2015: 102).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Palembang karena wilayah ini memiliki potensi yang sangat menguntungkan. Tanahnya yang subur serta jaringan sungai yang luas memudahkan proses pengangkutan

hasil panen ke pelabuhan, sehingga cocok untuk menghasilkan komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan lada. Selain itu, setelah Kesultanan Palembang Darussalam dibubarkan pada tahun 1823, Belanda memperoleh kendali penuh atas pemerintahan lokal, sehingga lebih mudah dalam mengatur tenaga kerja dan produksi. Di sisi lain, kegagalan sistem sewa tanah serta kebutuhan untuk menutup kerugian setelah perang mendorong Belanda memilih tanam paksa sebagai solusi. Palembang dipilih karena memiliki potensi besar sekaligus mudah dikuasai, sehingga memberikan keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda.

Sistem Tanam Paksa di Palembang mendapat kritik karena membebani rakyat melalui kewajiban menanam tanaman ekspor serta kerja paksa yang mengabaikan kebutuhan pangan mereka sendiri. “Akibatnya, masyarakat mengalami kemiskinan, kekurangan bahan makanan, serta tekanan kerja yang berat dalam kehidupan sehari-hari” (Kartodirdjo, 1993: 45). Lebih lanjut Deliar Noer dalam bukunya *Pengantar Sejarah Indonesia* menjelaskan bahwa:

Kebijakan ini menunjukkan sifat eksploitatif pemerintah kolonial yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding kesejahteraan penduduk pribumi. Selain itu, dalam pelaksanaannya sering terjadi berbagai penyimpangan oleh pejabat kolonial dan elite lokal, seperti penarikan pajak berlebihan dan pemaksaan tenaga kerja di luar aturan yang telah ditetapkan (Noer, 1980: 78).

Kondisi tersebut memicu kritik luas, baik dari masyarakat maupun kalangan tertentu di Belanda, sehingga pemerintah kolonial akhirnya mulai menghapus sistem Tanam Paksa secara bertahap dan menggantinya dengan sistem ekonomi liberal pada paruh kedua abad ke-19.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: sistem Tanam Paksa di Palembang sangat merugikan rakyat karena mereka dipaksa menanam tanaman ekspor dan bekerja keras tanpa memperhatikan kebutuhan hidup sendiri. Hal ini membuat masyarakat menjadi miskin, kekurangan makanan, dan hidup dalam tekanan. Selain itu, dalam pelaksanaannya sering terjadi kecurangan oleh pejabat kolonial dan elite

lokal, seperti pajak yang berlebihan dan kerja paksa yang melampaui aturan. Akibat banyaknya penderitaan dan kritik, akhirnya sistem Tanam Paksa mulai dihapus dan diganti dengan sistem ekonomi yang lebih bebas.

Dari beberapa penelitian terdahulu, yang peneliti temukan seperti penelitian yang ditulis oleh Zulkarnain (2010) Universitas Negeri Yogyakarta mengenai *Serba Serbi Tanam Paksa* dan penelitian yang ditulis oleh Indri Safitri (2017), tentang *Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M. Palembang*: UIN Raden Fatah Palembang, serta beberapa tulisan yang lain.

Ditemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini memiliki kebaruan karena membahas pelaksanaan sistem tanam paksa di Palembang secara khusus, bukan di Jawa seperti kebanyakan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana tanam paksa diterapkan setelah Kesultanan Palembang dibubarkan tahun 1823, peranan pejabat lokal dalam sistem kolonial. Penelitian ini melihat dampak tanam paksa terhadap kehidupan (politik, ekonomi, sosial dan budaya) masyarakat Palembang, yang selama ini belum banyak dibahas. Dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana *cultuurstelsel* berlangsung dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Palembang pada tahun 1830–1870.

Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan bagaimana Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Palembang dengan menelusuri hubungan antara perubahan ekonomi dunia sejak abad 15 dengan praktik eksploitasi agraris melalui *Cultuurstelsel* di Palembang sebagai bagian dari strategi kolonial Belanda dalam memenuhi kebutuhan industrinya di Eropa.

B. Pembatasan Masalah

Untuk mencapai titik fokus pada penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua aspek yaitu aspek spasial (wilayah) dan aspek temporal (waktu).

1. Aspek spatial (ruang atau wilayah), penulis membatasi hanya di Palembang, Sumatera Selatan karena penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sistem tanam paksa di Palembang.
2. Aspek temporal (waktu), terhadap aspek temporal penulis membatasi penelitian pada tahun (1830-1870) karena pada tahun 1830 merupakan awal diberlakukannya sistem tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch di wilayah Hindia Belanda (termasuk Palembang) hingga tahun 1870 sistem tanam paksa berakhir secara resmi Ketika diberlakukannya Undang-undang Agraria.

C. Perumusan Masalah

Dari judul penelitian tentang *Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Keresidenan Palembang 1830-1870* menimbulkan beberapa permasalahan yang akan penulis kaji antara lain:

1. Apa yang melatarbelakangi diterapkannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda di Keresidenan Palembang tahun 1830-1870?
2. Bagaimana mekanisme dan aturan pokok sistem tanam paksa di Keresidenan Palembang?
3. Bagaimana dampak ekonomi, sosial dan kultural dari pelaksanaan tanam paksa bagi kehidupan masyarakat Keresidenan Palembang pada masa itu?
4. Mengapa sistem tanam paksa akhirnya mendapat kritik dan mulai dihapuskan di Keresidenan Palembang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian *tentang Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Palembang* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang diberlakukannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda di Keresidenan Palembang pada tahun 1830-1870
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme dan aturan pokok dalam pelaksanaan sistem tanam paksa di Keresidenan Palembang.

3. Untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan kultural dari penerapan sistem tanam paksa bagi kehidupan masyarakat Keresidenan Palembang.
4. Untuk mengidentifikasi latar belakang munculnya kritik dan mulai dihapuskannya pelaksanaan sistem Tanam Paksa di Keresidenan Palembang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu Sejarah, khususnya Sejarah masa kolonial mengenai sistem tanam paksa di Keresidenan Palembang tahun 1830-1870, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat Palembang pada masa pemerintah kolonial Belanda. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan Pelaksanaan sistem tanam paksa 1830-1870 di Keresidenan Palembang

2. Secara Praktis

Kegunaan kajian atau penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, dengan adanya kajian ini dapat membuka wawasan, memberikan pemahaman yang baik tentang penulisan karya ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan penulisan khususnya mengenai *Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa 1830-1870 di Keresidenan Palembang*.
- b. Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi mengenai *Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa 1830-1870 di Keresidenan Palembang*.

- c. Bagi institusi, penelitian ini dapat menambah wawasan kesejarahan dan dapat menjadi referensi bagi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya tentang *Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa 1830-1870 di Keresidenan Palembang*.

F. Definisi Istilah

Sesuai dengan judul penelitian penulis tentang *Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Keresidenan Palembang 1830-1870 (Suatu Kajian Historis)*, maka penulis dapat menguraikan beberapa definisi istilah yang digunakan untuk menerangkan beberapa istilah-istilah yang kurang dimengerti. Definisi istilah tersebut diperoleh dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2016* yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan dari *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* yang diterbitkan oleh Serba Jaya karangan Risa Agustin tahun 2010.

- Afdeeling*** : Wilayah setingkat kabupaten yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial, biasanya dipimpin oleh seorang pejabat Belanda yang disebut Asisten Residen.
- Asisten Residen*** : Pejabat pemerintah kolonial Belanda yang memimpin wilayah Afdeeling dan bertugas menjalankan serta mengawasi kebijakan kolonial di daerah.
- Batig Slot*** : Keuntungan bersih yang diperoleh pemerintah kolonial Belanda dari pelaksanaan tanam paksa *cultuurstelsel*
- Bupati*** : kepala daerah pribumi yang bekerja di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda, seperti residen dan kontrolir.
- Cultuurstelsel (Tanam Paksa)*** : Sistem tanam wajib yang diberlakukan oleh Belanda mulai 1830, mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor untuk kepentingan kolonial.

- Devide Et Impera*** : Strategi politik yang digunakan untuk memecah persatuan suatu kelompok atau masyarakat agar lebih mudah dikuasai dan dikendalikan.
- Eksplorasi*** : Pemanfaatan tenaga, tanah, dan sumber daya masyarakat jajahan secara paksa demi keuntungan pihak penjajah.
- Finansial Culturstelsel*** : Aspek keuangan dalam sistem tanam paksa, yaitu bagaimana tanam paksa menghasilkan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial Belanda.
- Integrasi*** : Proses penyatuan atau penggabungan berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis.
- Jalur Sutra (Silk Road)*** : Rute perdagangan kuno antara Asia dan Eropa yang menjadi latar belakang awal kolonialisme Eropa.
- Keresidenan Palembang*** : Keresidenan Palembang adalah wilayah administratif utama dalam pemerintahan kolonial Belanda di Palembang yang dipimpin oleh Residen dan berfungsi sebagai pusat pengendalian pemerintahan daerah.
- Kolonialisme*** : Paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.
- Konstantinopel*** : Ibu kota Kekaisaran Byzantium yang jatuh ke tangan Turki Utsmani tahun 1453, menjadi awal tertutupnya jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa.
- Kontrolir*** : Pegawai pemerintah kolonial yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah

- Loji Sungai Aur*** : Bangunan atau kantor dagang milik Belanda (VOC) yang didirikan di kawasan Sungai Aur, Palembang.
- Landrente*** : Pajak tanah yang diubah menjadi kewajiban menanam tanaman ekspor dalam sistem tanam paksa.
- Lurah*** : Pejabat pemerintah yang memimpin kelurahan dan bertugas mengurus administrasi serta pelayanan masyarakat di tingkat lokal.
- Marga*** : Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, pemimpin, serta aturan adat sendiri.
- Onder Afdeeling*** : Istilah dalam administrasi kolonial Belanda yang berarti bagian wilayah yang lebih kecil dari Afdeeling.
- Palembang*** : Palembang diartikan sebagai kota utama yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, serta sebagai nama bahasa Melayu dialek Palembang yang dipakai oleh penduduk daerah itu. Jadi, istilah Palembang menggambarkan baik wilayah kota maupun ragam bahasa yang digunakan masyarakatnya.
- Pelaksanaan*** : Pelaksanaan diartikan sebagai proses atau tindakan untuk menjalankan, menerapkan, atau mewujudkan suatu rencana, aturan, atau kegiatan sehingga sesuatu itu benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Pemerintahan administratif kolonial*** : Pemerintahan administratif kolonial adalah sistem pengelolaan wilayah jajahan oleh pemerintah kolonial melalui struktur birokrasi yang terorganisir untuk kepentingan

kekuasaan dan ekonomi.

- Pemerintah Kolonial Belanda*** : Otoritas resmi Belanda yang mengatur wilayah Hindia Belanda setelah pembubaran VOC.
- Penjelajahan Samudera*** : Ekspedisi maritim Eropa untuk mencari sumber rempah langsung ke Asia, terutama ke Nusantara.
- Pola Stagnasi*** : Keadaan atau pola perkembangan yang tidak mengalami kemajuan (mandek), tetap, atau berjalan sangat lambat dalam jangka waktu tertentu.
- Rempah-rempah*** : Komoditas utama (seperti pala, cengkeh, lada) yang menjadi daya tarik utama bangsa Eropa datang ke Nusantara.
- Residen*** : Pejabat tinggi dalam pemerintahan kolonial Belanda yang memimpin suatu wilayah yang disebut karesidenan (Residency).
- Staatblad*** : Lembaran resmi pemerintah kolonial Belanda yang digunakan untuk mengumumkan dan menetapkan peraturan hukum.
- Sistem Tradisional*** : Sistem yang dijalankan berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.
- Stratifikasi Sosial Kolonial*** : Lapisan masyarakat pada masa kolonial berdasarkan ras: Eropa (kelas atas), Asia non-pribumi (kelas menengah), dan pribumi/inlander (kelas bawah).
- Subsisten*** : Subsisten adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri secara sederhana.

- Undang-Undang Agraria 1870*** : Hukum kolonial yang menandai berakhirnya sistem tanam paksa dan memulai masa liberalisme ekonomi di Hindia Belanda.
- Van den Bosch*** : Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menggagas dan menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia mulai tahun 1830.
- VOC*** : *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* Perusahaan dagang Belanda yang memonopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur sebelum diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1800.
- Wedana*** : Pejabat pemerintahan di bawah bupati yang memimpin wilayah tertentu (kawedanan) *dalam sistem administrasi, terutama pada masa kolonial Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia.*
- Wingewest*** : Sebutan bagi wilayah jajahan yang difungsikan sebagai daerah penghasil kekayaan bagi negeri induk (Belanda).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M., dkk. (1984). *Kota Palembang Sebagai Kota Dagang dan Industri*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Abdullah, M., dkk. (1991). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Abdullah, T. (1987). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdullah, H. (1986). *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Logos.
- Abdurahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Abdurrahman. (2006). Paragmatik: Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan. *Lingual: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 1(1), 117–133.
- Abubakar, A., dkk. (2020). *Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia Dan Heritage di Sumatra Selatan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Absiroh, Isjoni, & Bunari. (2017). *Sejarah Pemahaman 350 Tahun Indonesia Dijajah Belanda*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Afwan, B. (2021). Dampak Kebijakan Tanam Paksa Terhadap Keadaan Sosial dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1830–1865. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2), 57–63.
<https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.16423>
- Alfian, I. (2015). *Pemikiran dan Perubahan Dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aman. (2007). *Sejarah Indonesia Abad Ke-19: Penerapan dan Dampak Sistem Tanam Paksa*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY.
- Anwar, R. (2010). *Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia*. Kompas.
- Ardianti, R. D. (2021). *Peranan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Raden Mohamad Mangoendiprodjo Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Surabaya Tahun 1945–1949*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atar, S. (1993). *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Booth, A., dkk. (1988). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Burger, D. H. (1962). *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Jilid I). Jakarta: Pradnjaparamita.
- Burger, D. H. (1975). *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Daliman. (2001). *Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial UNY.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Darmawan, A. (2015). *Dampak Pelaksanaan Cultuurstelsel di Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Djajadiningrat, N. (1983). *Tjerita Dari Djawa Dalam Masa Kolonial*. Jakarta: Djambatan.
- Fatmah. (2023). *Historiografi Indonesia*. Palembang: Noer Fikri.
- Fatmah. (2023). *Sejarah Indonesia Masa Kolonial*. Palembang: Rafah Press UIN Raden Fatah Palembang.
- Farida. (2011). *Sultan Mahmud Badaruddin II dan Perjuangannya Melawan Kolonial Belanda*. Palembang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Selatan.
- Furnivall, J. S. (2009). *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: LP3ES.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hafiz, M. (2020). *Perekonomian Palembang masa Kesultanan sampai masa kolonial Belanda (1724–1942 M)*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hanafi, S., & Nawiyanto. (2022). Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830–1870). *Historia*, 4(2), 141–158.

- Hanafiah, D. (1995). *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Palembang: Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harisnur. (2022). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Herlina, N. (2008). *Ekonomi Rakyat Palembang Pada Masa Kolonial*. Bandung: Pustaka Nusantara.
- Ibnu, M. (2003). *Panduan Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ismaun. (2001). *Sejarah Indonesia*. Bandung: Historia Utama Press.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900 (Jilid I)*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1999). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 1*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bali Pustaka.
- Kartodirdjo, S., & Suryo, D. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian sosial ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kielstra, E. B. (1892). *De Cultures Of Sumatera*. Leiden: E. J. Brill.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koenjoroningrat. (1995). *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. (1985). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *Jurnal SOCIA UNY*. Vol. 11. No. 2. Hal. 163-172 <https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5301>
- Kurniawan, H. (2015). Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830–1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 163–172. <https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5301>

- Mahyuddin, A. (2013). *Budaya Agraris Dan Perubahan Kolonial Di Palembang*. Palembang: Pustaka Musi.
- Margono, S. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miftakhuddin. (2019). *Kolonialisme: Eksploitasi Dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. Sukabumi: CV Jejak.
- Mubyarto. (1992). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Murdiyastomo, H. Y. A., & Sabrina, A. N. P. (2023). Preangerstelsel: Sistem tanam paksa kopi Priangan tahun 1723–1892. *Estoria: Journal of Social Sciences & Humanities*, 3(2), 445–459.
- Nawiyanto, S., & Hanafi, S. (2022). Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830–1870). *Historia: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(2), 141–158.
- Nawiyanto. (2018). *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, S. W., Dkk (2025). Analisis Ideologi Kolonialisme Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian pos kolonial. *Student Research Journal*, Vol.3, No1.
- Noer, D. (1985). *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Noer, D. (1980). *Pengantar Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Notosusanto, N. (1986). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Nurhayati. (2025). *Sejarah Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Panji, K. A. R., & Sri, S. (2014). Sejarah Keresidenan Palembang. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 14(2).
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia* (Jilid IV). Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia* (Jilid V). Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, B. (2010). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan Kewarnageraan. Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Ramayulis. (2011). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramdhani, S. (2023). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Karya Agung.
- Ridwan, M. (2018). *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ricklefs, M. C. (2011). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rivai, L. (2001). *Sejarah Pendidikan di Kota Palembang*. Philosophy Press.
- Rochmiatun, E. (2011). *Historiografi Dan Kepustakaan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Romadi. (2011). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Tanam Paksa (1830–1870). *Forum Ilmu Sosial*, 38(1), 32–43.
- Sa'diyah, A. (2019). Pengaruh Sistem Tanam Paksa Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 1830–1870. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 4(1).
- Safitri, I. (2017). *Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda 1825–1942 M*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Saleh, M. I. (1981). *Sekilas Mengenai Daerah Palembang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sair, A., & Irwanto, D. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah: Cara cepat menulis sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Santoso, H. (2010). *Struktur Kekuasaan Lokal di Palembang Masa Kolonial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santun, D. I. M. (2010). *Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Sardiman, A. M. (2012). *Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Sardiman, A. M. (2013). *Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Sawirman. (2010). *Sistem Tanam Paksa di Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Pribumi*. Padang: Universitas Andalas.

- Sinaga, R., dkk. (2025). "Dari Tanam Paksa Ke Politik Etis: Dinamika Kebijakan Kolonial Belanda dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pribumi." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Vol. 10 No. 04. Hal 300-313. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.34116>
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sondarika, W. (2015). Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia Tahun 1830–1870. *Artefak*, 3(1), 59–66.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono. (1991). *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908–1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhartono. (2010). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhartono. (2014). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, M. (2011). *Struktur Sosial dan Perubahan Masyarakat Sumatera Selatan Abad Ke-19*. Yogyakarta: Ombak.
- Sukardi. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulasman. (2014). *Pengantar Sejarah Kolonialisme di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surastopo, H. (1981). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suryo, D. (2000). *Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan UGM.
- Susetyo, B., & Ravico, R. (2021). Perekonomian Masyarakat Onder Afdeeling Moesi Ueloe Tahun 1900–1942. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 9(2).
- Susilo, A., & Sarkowi. (2020). Pengaruh Politik Cultuurstelsel Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia Tahun 1830–1870. *Jurnal Swadesi*, 1(1), 14–23.
- Syafrida. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

- Syair, A. (2008). Metodologi Sejarah: Sumbangan Pemikiran Bagi Mahasiswa Dalam Penelitian Sejarah Untuk Skripsi. *Cirsetra*, 1, 5–6.
- Tasnur, I., dkk. (2022). Liberalisme Dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870–1900). *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 4(2), 71–78.
- Wahyono. (2018). *Sejarah Ekonomi Kolonial di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Wasino. (2007). *Kapitalisme Bumi Putera: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKiS.
- Wasino. (2007). *Dari Tanam Paksa Ke Politik Etis*. Semarang: UNNES Press.
- Wasino. (2008). *Berjuang Menjadi Wirausahawan: Sejarah kehidupan kapitalis bumi putra Indonesia*. Semarang: UNNES Press.
- Widja, I. G. (2018). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widja, I. G. (2018). *Sejarah Indonesia: Perspektif lokal dan nasional*. Yogyakarta: Ombak.
- Zed, M. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900–1950*. Jakarta: LP3ES.
- Zed, M. (2009). *Bagaimana Hidup Sebagai Rakyat Jajahan? Beberapa Catatan Tentang Apresiasi Sejarah Kebangsaan Untuk Generasi Masa Kini*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Zed, M. (2010). *Sumatra Dalam Lintasan Sejarah*. Padang: Pusat Studi Humaniora UNP.
- Zulkarnain. (2010). Serba-Serbi Tanam Paksa. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 8(1), 30–46. <https://doi.org/10.21831/istoria.v8i1.3720>
- Zulkarnain. (2011). Dampak Penerapan Sistem Tanam Paksa Bagi Masyarakat. *Informasi*, 37(1), 56–71.
- Zulkarnain, K. A. R. P. (2011). *Sejarah Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Zulkarnain, K. A. R. P. (2015). *Palembang Dalam Pusaran Kolonialisme*. Palembang: Unsri Press